

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan kondisi suatu entitas. Salah satu prinsip fundamental yang digunakan untuk menjaga kualitas informasi tersebut adalah konservatisme akuntansi, yaitu sikap kehati-hatian dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan, beban, aset, dan liabilitas. Konservatisme menuntut pengakuan kerugian secara lebih cepat ketika terdapat indikasi penurunan nilai, serta menunda pengakuan keuntungan hingga benar-benar terealisasi, guna menghindari penyajian laporan keuangan yang terlalu optimistis. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Givoly & Hayn (2000) dalam Agata (2021) menyatakan bahwa konservatisme dalam Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 FASB diartikan sebagai reaksi hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian perusahaan, sehingga ketidakpastian tersebut dapat dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan risiko yang ada.

Dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan penggunaan basis akrual, konservatisme akuntansi dipandang sebagai mekanisme penting untuk menjaga reliabilitas, kredibilitas, dan perlindungan pemangku kepentingan. Watts dalam Savitri (2016) menjelaskan bahwa konservatisme muncul sebagai respons terhadap risiko kesalahan estimasi dan asimetri informasi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, konservatisme tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki dimensi etis dalam pelaporan keuangan.

Namun, berbagai fenomena menunjukkan bahwa prinsip konservatisme akuntansi sering kali tidak diterapkan secara konsisten, bahkan dilanggar sehingga menimbulkan distorsi pelaporan keuangan, terutama pada perusahaan dengan tingkat ketidakpastian tinggi (Aulia dkk., 2021). Hal ini terlihat pada praktik pengakuan pendapatan prematur, penundaan pengakuan beban, serta overvaluasi

aset menjadi pola umum dalam berbagai skandal akuntansi, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Di Indonesia, beberapa kasus besar memperlihatkan bagaimana prinsip konservatisme akuntansi sering kali dilanggar. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencerminkan ketiadaan sikap kehati-hatian dalam pengelolaan dan pelaporan investasi. Penempatan dana pada instrumen berisiko tinggi, disertai praktik manipulasi nilai aset dan pengabaian pencatatan beban secara memadai, menunjukkan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan citra kinerja jangka pendek, bukan sebagai representasi kondisi ekonomi yang wajar. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kerugian negara mencapai sekitar Rp16,81 triliun. (BPK, 2020). Demikian pula, pada kasus PT Asabri (Persero) ditemukan penyalahgunaan pengelolaan dana investasi yang berujung pada kerugian negara sekitar Rp22,78 triliun (Kompas, 2021). Kedua kasus tersebut mencerminkan kegagalan menerapkan konservatisme dalam penilaian investasi dan pengakuan kerugian menyebabkan risiko yang sesungguhnya tersembunyi hingga akumulasi kerugian menjadi tidak terkendali, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian negara dan runtuhnya kepercayaan publik.

Fenomena serupa terlihat dalam skandal Wirecard AG di Jerman, di mana pengakuan kas dan pendapatan fiktif mencerminkan pelanggaran ekstrem terhadap prinsip konservatisme. Alih-alih menahan pengakuan pendapatan yang belum pasti, manajemen justru secara agresif melaporkan kinerja keuangan yang tidak didukung bukti ekonomi riil. Praktik perusahaan mengakui pendapatan dan kas dari akun palsu hingga senilai EUR 1,9 miliar yang menyesatkan investor dan kreditur (Betz, F., & Kim, M., 2021).

Di Tiongkok, Luckin Coffee juga menunjukkan bagaimana ketiadaan prinsip konservatisme dalam pengakuan pendapatan memperbesar asimetri informasi. Pendapatan yang seharusnya ditunda pengakuannya karena tidak didukung transaksi ekonomi yang sah justru diakui secara prematur untuk memenuhi ekspektasi pasar. Pada kasus ini Luckin Coffee melakukan transaksi palsu dan invoice manipulatif untuk memperbesar pendapatan hingga USD 300

juta, yang mengakibatkan perusahaan didenda USD 180 juta oleh U.S. *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan *delisting* dari Nasdaq (SEC, 2020).

Kasus di Amerika Serikat, seperti *Pareteum Corporation*, semakin menegaskan relevansi konservatisme dalam konteks pengakuan pendapatan. Alih-alih menahan pengakuan pendapatan yang belum pasti, justru perusahaan mengakui pendapatan dari *purchase order* yang belum mengikat dan belum direalisasikan secara ekonomi. Kasus ini menghasilkan *over-statement* sekitar USD 12 juta untuk tahun 2018 dan USD 30 juta untuk kuartal pertama dan kedua tahun 2019 (Posner, 2023).

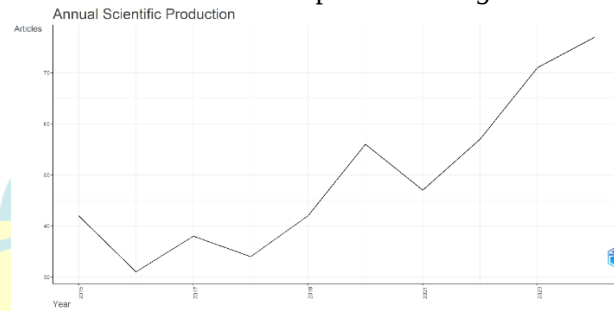
Secara keseluruhan, kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa konservatisme akuntansi bukan sekadar pilihan teknis, melainkan mekanisme tata kelola dan etika pelaporan keuangan. Ketika konservatisme dilemahkan atau ditinggalkan, laporan keuangan kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pengambilan keputusan yang andal, dan berubah menjadi sarana distorsi informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip konservatisme tetap relevan dan krusial dalam menghadapi tekanan pasar, kompleksitas transaksi modern, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Meskipun prinsip konservatisme akuntansi telah lama diakui sebagai mekanisme penting dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan, berbagai kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan praktik (*practical gap*) antara norma akuntansi dan realitas implementasinya. Konservatisme sering kali dipahami dan diterapkan secara formalistik sebagai kepatuhan terhadap standar, namun gagal diinternalisasi sebagai sikap etis dan tanggung jawab moral dalam proses pengambilan keputusan akuntansi. Akibatnya, dalam situasi tekanan kinerja dan konflik kepentingan, prinsip kehati-hatian justru diabaikan, sehingga konservatisme kehilangan fungsi protektifnya terhadap pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan konservatisme akuntansi tidak semata terletak pada aspek teknis, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai dan etika dalam praktik akuntansi sehari-hari.

Relevansi konservatisme akuntansi dalam penelitian juga terlihat pada Gambar 1.1 Analisis Tren Topik *Accounting Conservatisme* menggunakan data

Scopus, terlihat bahwa jumlah publikasi ilmiah terkait konservatisme akuntansi mengalami peningkatan signifikan selama periode 2015–2024. Tren ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi masih menjadi isu yang terus berkembang dan relevan untuk diteliti.

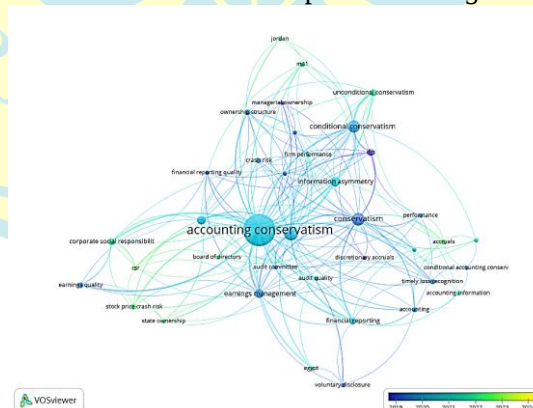
Gambar 1. 1 Analisis Tren Topik *Accounting Conservatism*



Sumber : Data RStudio, diolah oleh Penulis (2025)

Pemetaan bibliometric pada Gambar 1.2 Analisis Bibliometriks Topik *Accounting Conservatism* juga memperlihatkan bahwa penelitian konservatisme akuntansi didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang mengkaji hubungan konservatisme dengan variabel seperti *earnings management*, *discretionary accruals*, *audit committee*, *corporate social responsibility*, dan *financial performance*. Dominasi topik-topik tersebut menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi umumnya dipahami sebagai mekanisme teknis yang dapat diukur melalui berbagai proksi numerik.

Gambar 1. 2 Analisis Bibliometriks Topik *Accounting Conservatisme*



Sumber: Data VOSViewer, diolah oleh Penulis (2025)

Meskipun demikian, temuan dari analisis bibliometrik tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian konservatisme akuntansi masih terbatas pada hubungan antar-variabel kuantitatif seperti earnings management, audit committee,

corporate governance, dan financial performance. Hampir tidak ada penelitian yang menyoroti dimensi moral, spiritual, dan sosial di balik penerapan prinsip kehati-hatian tersebut. Padahal, berbagai kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri memperlihatkan bahwa kegagalan konservatisme bukan hanya karena kelemahan teknis, tetapi juga oleh orientasi pelaporan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagai tanggung jawab moral.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi konservatisme akuntansi. Sari dan Agustina (2021) menemukan bahwa konflik kepentingan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi, sementara Novitasari dan Suwarno (2022) serta Damayanti dan Purwanto (2025) menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan mekanisme *good corporate governance* lebih dominan dalam menentukan tingkat konservatisme. Di sisi lain, penelitian Suryandari dan Priyanto (2016) mengungkapkan bahwa risiko litigasi dapat memperkuat hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi, karena perusahaan cenderung bersikap lebih hati-hati dalam penyajian laporan keuangannya untuk menghindari tuntutan hukum. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi masih dipahami secara parsial dan sangat bergantung pada pendekatan serta proksi yang digunakan, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana konservatisme diimplementasikan secara nyata dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan pemetaan literatur dan analisis bibliometrik, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan empiris (*empirical gap*) dalam penelitian konservatisme akuntansi. Sebagian besar studi terdahulu mengkaji konservatisme melalui pendekatan kuantitatif dengan proksi-proksi numerik tertentu, sehingga berfokus pada hubungan statistik antar-variabel tanpa menggali makna, pengalaman, dan pertimbangan etis pelaku akuntansi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti proxy DER (Agata dkk., 2021), kebijakan dividen atau DIVASS (Lutfiany dkk., 2022), serta pajak sebagai variabel independen (Rusydi dkk., 2017). Perbedaan proksi yang digunakan menghasilkan temuan yang beragam dan belum mampu menjelaskan bagaimana konservatisme akuntansi dipraktikkan, dipahami, dan dimaknai oleh pelaku akuntansi dalam konteks nyata perusahaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya *literature gap* yang signifikan, khususnya terkait dimensi nilai dan etika dalam implementasi konservatisme akuntansi.

Baik kesenjangan praktik maupun kesenjangan empiris tersebut menunjukkan perlunya pendekatan penelitian yang tidak hanya menjelaskan “apa” dan “seberapa besar” konservatisme akuntansi diterapkan, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” prinsip tersebut dimaknai serta dijalankan oleh pelaku akuntansi dalam konteks nyata. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi dipilih untuk menggali pengalaman sadar dan refleksi etis akuntan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik konservatisme akuntansi.

Selain itu, peneliti memandang bahwa hampir seluruh penelitian konservatisme akuntansi di Indonesia masih berlandaskan paradigma akuntansi arus utama yang dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi dan kepentingan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan pernyataan Firdaus, A. dkk. (2016) Kepragmatisan sistem akuntansi di Indonesia yang selalu mengikuti budaya Barat dapat dilihat dari beberapa konsep dasar akuntansi, khususnya konsep entitas akuntansi (*entity accounting*), yang menjadi jebakan sosiologis bagi masyarakat Indonesia. Konsep ini, secara inheren, merepresentasikan tujuan pengungkapan laporan keuangan dan kepentingan para pemakainya yang tidak jarang akan menimbulkan konflik kepentingan karena mengedepankan egoisme semata. Pendekatan ini cenderung menempatkan konservatisme sebagai alat pengendalian laba atau manajemen risiko semata, tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang hidup dalam konteks Indonesia. Akibatnya, konservatisme akuntansi berpotensi direduksi menjadi sekadar teknik akuntansi, bukan sebagai prinsip kehati-hatian yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, Akuntansi Pancasila menawarkan perspektif alternatif untuk memahami konservatisme akuntansi secara lebih utuh. Akuntansi Pancasila hadir sebagai alternatif konseptual yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan moralitas sebagai dasar praktik pelaporan keuangan. Pancasila tidak hanya dipandang sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sistem etika dan pedoman moral dalam pengambilan keputusan bisnis (Azkiyah & Nurnisaa, 2024).

Akuntansi Pancasila berpijak pada pandangan bahwa akuntansi merupakan praktik sosial yang tidak bebas nilai, melainkan dibentuk oleh sistem nilai, budaya, dan ideologi masyarakat tempat akuntansi dipraktikkan. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial diposisikan sebagai landasan normatif dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Dalam kerangka ini, tujuan akuntansi tidak semata menghasilkan informasi yang relevan bagi kepentingan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut disusun secara adil, jujur, dan bertanggung jawab secara moral terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, Akuntansi Pancasila menggeser orientasi akuntansi dari sekadar value for shareholders menuju value for humanity and society (Kompurini, Nurul dan Anis Wulandari, 2022).

Penelitian oleh Meilani et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam akuntansi berperan penting dalam membentuk karakter akuntan yang berintegritas secara moral dan sosial. Studi tersebut menegaskan bahwa praktik akuntansi yang berlandaskan Pancasila tidak hanya memperhatikan aspek materiil, tetapi juga aspek non-materiil, termasuk kesadaran tanggung jawab akuntan kepada Tuhan dan sesama manusia dalam pengelolaan serta pelaporan informasi keuangan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, khususnya, dipahami sebagai sumber kesadaran etis yang mendorong kejujuran, kehati-hatian, dan penolakan terhadap praktik manipulatif dalam pelaporan keuangan.

Sejalan dengan temuan tersebut, Situmorang, Tjaraka, dan Novita (2025) mengemukakan bahwa *Pancasila perspective accounting* merupakan pendekatan yang menempatkan akuntansi sebagai praktik sosial dan moral, bukan sekadar instrumen ekonomi. Melalui pendekatan fenomenologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila mampu menginternalisasikan dimensi kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesional akuntan. Dengan demikian, akuntansi berfungsi sebagai sarana akuntabilitas yang tidak hanya memenuhi kepentingan organisasi, tetapi juga kepentingan masyarakat luas.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik akuntansi tercermin melalui penghayatan dan pengamalan butir-butir Pancasila sebagaimana diatur dalam

Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan dinyatakan tetap berlaku melalui Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam proses pengambilan keputusan akuntansi sehari-hari. Dalam kerangka ini, akuntansi tidak dipahami semata sebagai praktik teknis, melainkan sebagai aktivitas moral yang mengandung tanggung jawab etis dan sosial.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa diinternalisasi melalui kesadaran spiritual dan integritas moral akuntan, yang memandang pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan butir pengamalan sila pertama yang menekankan keimanan, ketakwaan, serta sikap jujur dan amanah dalam setiap perbuatan. Kesadaran tersebut mendorong sikap kehati-hatian, kejujuran, dan penolakan terhadap praktik manipulatif, sehingga konservatisme akuntansi dipraktikkan sebagai ekspresi etika dan keimanan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap standar akuntansi.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam pertimbangan dampak informasi keuangan terhadap pihak-pihak yang rentan, seperti karyawan, kreditor kecil, dan masyarakat sekitar. Sesuai dengan butir pengamalan sila kedua dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menekankan persamaan derajat manusia, tenggang rasa, dan larangan bersikap sewenang-wenang, konservatisme akuntansi dipahami sebagai upaya melindungi hak-hak pemangku kepentingan melalui penyajian informasi yang tidak berlebihan dan tidak menyesatkan.

Selanjutnya, nilai Persatuan Indonesia diinternalisasi melalui upaya menjaga keseimbangan kepentingan berbagai kelompok dalam organisasi serta mencegah dominasi kepentingan tertentu dalam penyusunan laporan keuangan. Sejalan dengan butir pengamalan sila ketiga yang menempatkan kepentingan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan, praktik konservatisme berfungsi sebagai mekanisme penengah yang menghindarkan konflik kepentingan dan menjaga harmoni sosial dalam organisasi.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tercermin dalam proses pengambilan keputusan akuntansi yang tidak bersifat sepihak, melainkan melalui musyawarah,

pertimbangan profesional, dan mekanisme akuntabilitas internal. Konservatisme akuntansi dalam perspektif ini merupakan hasil kebijaksanaan kolektif, bukan instruksi manajerial yang oportunistik, sebagaimana ditekankan dalam butir pengamalan sila keempat.

Akhirnya, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa informasi keuangan harus disusun secara adil, tidak eksploitatif, dan tidak menimbulkan ketimpangan informasi. Sesuai dengan butir pengamalan sila kelima dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, konservatisme akuntansi menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mencegah akumulasi keuntungan sepihak melalui pelaporan yang terlalu optimistis.

Sejalan dengan pemaparan di atas, relevansi Akuntansi Pancasila terhadap konservatisme akuntansi dapat dimaknai secara eksplisit dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 menekankan kejujuran, tanggung jawab, tenggang rasa, keadilan, serta larangan bertindak sewenang-wenang nilai-nilai yang secara substantif sejalan dengan esensi konservatisme akuntansi dalam menahan pengakuan keuntungan yang belum pasti dan mengakui risiko secara lebih dini. Oleh karena itu, konservatisme akuntansi dalam perspektif Akuntansi Pancasila tidak sekadar dimaknai sebagai kehati-hatian teknis, tetapi sebagai sikap etis yang berakar pada nilai Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan sosial.

Untuk memahami bagaimana butir-butir pengamalan Pancasila diinternalisasi secara subjektif dan diwujudkan dalam praktik konservatisme akuntansi, diperlukan pendekatan metodologis yang mampu menjangkau dimensi kesadaran, pengalaman moral, serta orientasi nilai para pelaku akuntansi. Dalam konteks ini, pendekatan fenomenologi dipilih karena secara ontologis memandang realitas sosial termasuk praktik akuntansi sebagai sesuatu yang dihidupi (*lived*) dan dimaknai oleh subjek yang terlibat di dalamnya, bukan sekadar direduksi menjadi variabel objektif atau kepatuhan terhadap aturan normatif. Sehingga pemahaman terhadap suatu fenomena tidak dapat dipisahkan dari pengalaman subjektif individu yang menjalaninya. Pemikiran ini kembali ditegaskan dalam kajian fenomenologi

kontemporer yang menempatkan pengalaman sadar (*lived experience*) sebagai dasar utama dalam memahami realitas sosial (Smith, dkk. , 2022)

Dalam kerangka PT X, konservatisme akuntansi tidak diposisikan sebagai konsekuensi mekanis dari standar akuntansi atau tekanan institusional semata, melainkan sebagai hasil dari kesadaran etis dan refleksi nilai akuntan sebagai subjek moral. Butir-butir pengamalan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 bersifat normatif-ideologis, namun aktualisasinya dalam praktik akuntansi sangat bergantung pada proses internalisasi personal dan konteks sosial tempat akuntan berpraktik. Oleh karena itu, pendekatan positivistik atau institusional yang menekankan hubungan sebab-akibat atau kepatuhan formal tidak memadai untuk menjelaskan mengapa konservatisme akuntansi dipraktikkan sebagai pilihan etis yang disadari, bukan sekadar kewajiban teknis.

Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman sadar (*conscious experience*) para pelaku akuntansi ketika berhadapan dengan dilema pelaporan keuangan, khususnya dalam situasi yang melibatkan ketegangan antara tuntutan kinerja ekonomi, tekanan manajerial, dan komitmen moral terhadap nilai-nilai Pancasila. Melalui proses *epoché* dan *bracketing*, peneliti secara sadar menanggukuhkan asumsi teoretis, standar profesional, dan kerangka regulatif yang selama ini dianggap *taken-for-granted*, sehingga makna konservatisme akuntansi dapat dipahami dari perspektif pelaku sebagai pengalaman etis yang dihayati secara reflektif. (Neubauer, dkk., 2019). Sehingga fenomenologi memungkinkan pengungkapan bagaimana nilai Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab social sebagaimana tercermin dalam butir-butir pengamalan Pancasila mengalir ke dalam pertimbangan profesional akuntan ketika menentukan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan.

Penelitian ini mengambil PT X di Kota Cirebon sebagai studi fenomenologi, karena wilayah ini memiliki dinamika bisnis yang unik, terutama dalam sektor industri kecil dan menengah yang sedang berkembang pesat. PT X sebagai salah satu perusahaan yang unik di Cirebon, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi metode dan treatment akuntansi konservatif, termasuk potensi konflik

kepentingan dalam proses pelaporan keuangan. Fenomena ini sangat relevan mengingat Cirebon adalah kota yang terus tumbuh dan berkembang, dengan berbagai perusahaan yang berada dalam tahap ekspansi, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap manajemen untuk mencapai target finansial tertentu.

Pemilihan PT X Cirebon, sebagai lokasi penelitian memperkuat relevansi pendekatan fenomenologi tersebut. PT X beroperasi dalam konteks bisnis yang sedang berkembang, dengan tekanan pencapaian kinerja dan potensi konflik kepentingan yang nyata dalam proses pelaporan keuangan. Kondisi ini menciptakan ruang reflektif yang kaya untuk mengamati bagaimana konservatisme akuntansi dimaknai dan dijalankan oleh para pelaku, khususnya ketika mereka harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan pertimbangan etis dan nilai-nilai Pancasila. PT X dengan demikian tidak diperlakukan sebagai objek generalisasi statistik, melainkan sebagai *situated context* yang memungkinkan pemahaman mendalam atas pengalaman etis pelaku akuntansi.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi dan etika bisnis di Indonesia. Menggabungkan pendekatan fenomenologi dengan nilai-nilai Pancasila menawarkan perspektif lokal yang unik untuk memandang implementasi konservatisme akuntansi yang sering kali dibahas dalam konteks global, tetapi jarang dibahas dalam kerangka nilai-nilai lokal. Ermawati dan Suhardianto (2024) menegaskan bahwa praktik akuntansi yang berlandaskan spiritualitas dan etika dapat menciptakan keberlanjutan dan akuntabilitas yang lebih bermakna, sekaligus mengkritik dominasi paradigma kapitalistik dalam akuntansi modern. Senada dengan itu, Budianto dkk. (2023) menjelaskan bahwa budaya akuntansi di Indonesia berkembang secara khas dari level keluarga, masyarakat, hingga bisnis, di mana nilai-nilai sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Ulfah dkk. (2023) juga menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, seperti etika Jawa yang menekankan keseimbangan dan kejujuran, ke dalam kode etik profesi akuntan Indonesia. Lebih lanjut, penelitian Putri dan Hanif (2024) menemukan bahwa praktik pembukuan pada usaha mikro di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kearifan lokal dan norma sosial masyarakat setempat, yang

menunjukkan bahwa dimensi budaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku akuntansi. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik akuntansi Indonesia menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga berkeadilan sosial dan bermoral tinggi.

Penelitian ini penting karena praktik konservatisme akuntansi di Indonesia masih cenderung dipahami dalam kerangka rasionalitas ekonomi yang berorientasi pada laba dan kepentingan pemegang saham, tanpa memperhatikan konteks sosial-budaya bangsa. Paradigma tersebut menunjukkan pengaruh kuat dari sistem akuntansi modern yang berakar pada kapitalisme Barat. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila menawarkan alternatif paradigma yang lebih holistik dengan menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, moralitas, dan kemanusiaan. Implementasi konservatisme akuntansi yang berlandaskan Pancasila bukan sekadar teknik kehati-hatian dalam pencatatan keuangan, tetapi merupakan refleksi etika bangsa yang menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial, transparansi, serta keadilan dalam setiap keputusan akuntansi. Dengan demikian, konservatisme akuntansi yang berlandaskan Pancasila diharapkan mampu melahirkan praktik pelaporan keuangan yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menggali secara mendalam pengalaman dan kesadaran etis para pelaku akuntansi dalam menerapkan konservatisme berbasis nilai-nilai Pancasila dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Akuntansi Pancasila sebagai bentuk dekolonisasi pemikiran akuntansi, sekaligus memperkuat integritas dan akuntabilitas pelaporan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Implementasi Konservatisme Akuntansi Ditinjau dari Perspektif Akuntansi Pancasila: Studi Fenomenologi pada PT X Cirebon.”

1.2 Rumusan Masalah

Praktik konservatisme akuntansi di Indonesia, termasuk di PT X Cirebon, masih menghadapi tantangan signifikan akibat tekanan untuk menampilkan kinerja keuangan yang stabil dan menguntungkan. Tekanan tersebut kerap mendorong praktik manajemen laba yang pada akhirnya berpotensi melemahkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan. Kondisi ini diperparah oleh dominasi paradigma akuntansi arus utama yang berakar pada rasionalitas ekonomi Barat, yang cenderung memisahkan praktik akuntansi dari konteks sosial-budaya lokal serta mengabaikan dimensi moral dalam pengambilan keputusan pelaporan keuangan. Selain itu, sebagian besar penelitian konservatisme akuntansi sebelumnya masih berfokus pada aspek teknis dan kuantitatif, dengan menempatkan konservatisme sebagai variabel yang diukur melalui berbagai proksi numerik. Pendekatan tersebut menyebabkan keterbatasan pemahaman terhadap bagaimana konservatisme akuntansi dijalankan dalam praktik nyata, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Dimensi etis, sosial, dan nilai-nilai lokal yang seharusnya melekat dalam praktik kehati-hatian justru kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam konteks PT X Cirebon, penting untuk mengeksplorasi bagaimana konservatisme akuntansi tidak hanya diukur atau diterapkan secara formal, tetapi juga dimaknai dan dijalankan secara konsisten dalam proses pelaporan keuangan sehari-hari. Lebih jauh, praktik konservatisme perlu dipahami dalam kaitannya dengan upaya menjaga kepercayaan dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama di tengah tekanan kinerja dan potensi konflik kepentingan yang menyertai dinamika bisnis perusahaan. Dengan demikian, studi ini berupaya menjembatani gap antara teori konservatisme dengan praktik yang berlandaskan nilai lokal dan kearifan budaya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis dapat menyusun rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengukuran dan implementasi konservatisme akuntansi di PT X Cirebon?
2. Bagaimana dampak konservatisme akuntansi terhadap pemangku kepentingan di PT X Cirebon?
3. Bagaimana konservatisme akuntansi di PT X Cirebon diharmonisasikan dengan nilai-nilai Pancasila?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengukuran serta implementasi konservatisme akuntansi di PT X Cirebon.
2. Menganalisis dampak konservatisme akuntansi terhadap pemangku kepentingan PT X Cirebon.
3. Mengeksplorasi harmonisasi konservatisme akuntansi dengan nilai-nilai Pancasila.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoretis

- a. Pengembangan Teori Akuntansi dan Etika: Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur akuntansi dengan menambahkan perspektif lokal mengenai penerapan konservatisme akuntansi dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Ini dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara etika bisnis dan praktik akuntansi, khususnya dalam hal penanganan konflik kepentingan untuk pemangku kepentingan perusahaan.
- b. Penerapan Fenomenologi dalam Akuntansi: Penelitian ini memberikan contoh konkret bagaimana metode penelitian fenomenologi dapat digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman subyektif pelaku dalam

konflik kepentingan di perusahaan, khususnya dalam penerapan akuntansi konservatisme.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Rekomendasi Kebijakan Perusahaan: Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen PT X maupun perusahaan lainnya untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam implementasi konservatisme akuntansi. Penelitian ini menawarkan pendekatan etis berdasarkan Pancasila, yang dapat diadopsi dalam kebijakan pelaporan keuangan perusahaan.
- b. Perbaikan Transparansi dan Akuntabilitas: Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, dengan mempertimbangkan aspek etika dan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

1.5.3 Manfaat Sosial

- a. Peningkatan Keadilan Sosial: Dengan menekankan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan, penelitian ini mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas dan kepentingan stakeholder dalam pengambilan keputusan terkait pelaporan keuangan.
- b. Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Dunia Bisnis: Penelitian ini dapat berkontribusi pada integrasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia bisnis, memperkuat semangat keadilan, tanggung jawab, dan etika dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia.

1.5.4 Manfaat bagi Pembuat Kebijakan

Panduan Regulasi Akuntansi: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan dan regulasi akuntansi yang mengutamakan prinsip-prinsip etika, termasuk menghindari potensi konflik kepentingan akibat perilaku akuntan yang mengimplementasikan konservatisme akuntansi.